



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/324/RB.06/2021

31 Maret 2021

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Tahun 2020

Yth. **Walikota Pasuruan**
di

Pasuruan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Pasuruan. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2020 adalah 62,19 dengan kategori "B". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	11,46
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,92
	III. Reform	30,00	15,28
Total Komponen Pengungkit		60,00	32,66
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,80
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,03
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,43
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,27
Total Komponen Hasil		40,00	29,53
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	62,19

2. Berikut hasil antara dari masing-masing leading sector yang telah diterima oleh kementerian PANRB:

No.	Hasil Antara	No.	Nilai	Sumber Data
1.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	88,47	ANRI
2.	Profesionalitas ASN	0-100	51,00	BKN
3.	Maturitas SPIP	0-5	2,86	BPKP
4.	Kapabilitas APIP	0-5	2,00	BPKP

3. Berbagai rekomendasi perbaikan yang telah kami sampaikan pada hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagian sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Pasuruan, sehingga telah terdapat beberapa perbaikan yang terjadi dalam penerapan reformasi birokrasi.
4. Hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi adalah:
- Kualitas penerapan reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah sudah berjalan cukup baik, namun penerapan pada perangkat daerah (PD) belum merata, sehingga belum mampu memberikan dampak perubahan yang signifikan;
 - Tindak Lanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum diterapkan secara menyeluruh;
 - Penerapan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan belum sepenuhnya optimal, seperti belum adanya *Grand Design* pengembangan SPBE dan beberapa aplikasi manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/*stakeholder* yang belum terintegrasi;
 - Penguatan sistem manajemen SDM belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi serta penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang belum dilakukan secara menyeluruh;
 - Indikator kinerja individu sebagai turunan dari kinerja organisasi di atasnya belum dijabarkan dengan optimal, sehingga belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai indikator capaian kinerja pegawai dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - Penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas, seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum berjalan secara efektif pada PD;
 - Pembangunan Zona Integritas belum cukup masif dan intensif dilakukan pada pada unit kerja yang memberikan layanan utama dan strategis, sehingga belum dapat mewujudkan unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
5. Penjelasan terkait komponen hasil antara lain sebagai berikut:

- a. Capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kota Pasuruan menunjukkan hasil yang Baik dengan nilai SAKIP 68,50 dengan predikat "B" tahun 2019 dan akuntabilitas keuangan dengan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK pada tahun 2019.
- b. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan Pemerintah Kota Pasuruan menunjukkan hasil sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

No.	Hasil Survei	Indeks	
		2019	2020
1.	Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	3,07	3,21
2.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	3,29	3,37

- 1) Hasil survei persepsi pelayanan tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pasuruan telah mampu meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang telah diberikan;
- 2) Hasil survei persepsi korupsi tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan sistem integritas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan telah mampu meningkatkan persepsi penerima layanan terhadap penerapan anti korupsi

- c. Hasil Survei Integritas Jabatan terhadap pegawai Pemerintah Kota Pasuruan



menunjukkan indeks **1,69** dari skala 4. Secara keseluruhan, hanya 7% responden yang memahami kinerjanya, ukuran kinerja, dan kontribusinya terhadap kinerja organisasi. Sedangkan 93% responden belum sepenuhnya memahami kinerjanya, ukuran kinerja, atau kontribusinya terhadap kinerja organisasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Kota Pasuruan dan PD. Program-program yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi serta rencana kerja pada level perangkat daerah agar fokus pada upaya-upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan

tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel, efisien dan efektif, serta pelayanan publik yang berkualitas;

2. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional serta beberapa Surat Menteri Dalam Negeri terkait Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhaan birokrasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik;
3. Meningkatkan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dengan menyusun *Grand Design* pengembangan SPBE serta pengintegrasian sistem aplikasi baik dalam manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/*stakeholder*;
4. Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh dan memetakan talenta/*talent pool* sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan;
5. Menyempurnakan ukuran kinerja individu sehingga lebih berorientasi hasil sesuai dengan levelnya serta melakukan penyempurnaan penjenjangan kinerja dan ditindaklanjuti dengan optimalisasi pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu dan dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi/ penghargaan ataupun *punishment* bagi pegawai;
6. Memperkuat kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan kebijakan benturan kepentingan. Serta memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja, sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan pengendalian internal;
7. Mengoptimalkan peran APIP sebagai *Quality Assurance and Consulting* yang bukan hanya berperan terhadap hal yang terkait dengan keuangan tetapi juga terhadap hal yang terkait dengan kinerja;
8. Meningkatkan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang strategis sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Pasuruan.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Kami menghargai upaya Walikota Pasuruan beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami berharap agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Pt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,



Agus Uji Hantara

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Timur;
4. Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional;
5. Ketua Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional.